

Strategi Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut

Melati Dama*, Arief Fachrureza

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

*Correspondence: melati.dama@fisip.unmul.ac.id

Abstrak. Pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan prinsip subsidiaritas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan strategi pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung, serta faktor pengaruh dalam pendanaan dan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja di Kampung Semurut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan dari berasal dari jurnal, artikel, dan buku serta sumber informasi yang dipublikasikan melalui internet. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja kampung Semurut dapat dikatakan efektif berupa Kejelasan tujuan yang dicapai, Kejelasan strategi mencapai tujuan, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat sasaran, Ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Semurut berupa, SDM aparatur yang memadai, partisipasi penduduk usia produktif tinggi, komunikasi baik antar pemerintah kampung. Sedangkan, faktor yang menghambat berupa adanya topografi kampung yang sulit terjangkau, akses suplai barang yang terbatas, sarana dan prasarana kampung belum memadai, serta perencanaan program kerja tidak matang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Semurut dinilai efektif dengan mempertimbangkan indikator seperti kejelasan tujuan, strategi, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat sasaran, dan ketersediaan sarana-prasarana.

Kata kunci : Strategi Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Abstract. Regional governments have the authority to regulate their own affairs based on the principle of autonomy and the principle of subsidiarity. The aim of this research is to analyze and explain strategies for funding and managing village income and expenditure budgets, as well as influencing factors in funding and managing budgets and income and expenditure in Semrut Village. Data collection techniques use interviews and literature studies from journals, articles and books as well as information sources published via the internet. The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The results of the research show that the management of the budget and expenditure income of Semerut village can be said to be effective in the form of clarity of goals achieved, clarity of strategies to achieve goals, careful planning, preparation of programs that are right on target, availability of facilities and infrastructure. Factors that support the effectiveness of managing the village's income and expenditure budget. Factors that support the effectiveness of managing the income and expenditure budget of Semrut Village include adequate human resources for the village apparatus, high participation of the productive age population, good communication between village governments. Meanwhile, inhibiting factors include village topography that is difficult to reach, limited access to supplies of goods, inadequate village facilities and infrastructure, and inadequate work program planning. The conclusion of this research is that the strategy for managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBK) of Semrut Village is considered effective by considering indicators such as clarity of objectives, strategy, careful planning, preparation of programs that are right on target, and availability of facilities and infrastructure.

Keywords : management strategy, revenue and expenditure budget

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kesatuan yang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), telah menyatakan

bahwa NKRI memiliki pemerintahan daerah yang terbagi menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota (Fartini, 2022). Pemerintahan daerah ini memiliki wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan prinsip subsidiaritas (Halwati, 2021).

Tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alfinia, 2021). Menurut Ali (2018) bahwa dalam upaya mengatur pemerintahan daerah, wilayah tersebut juga terbagi ke dalam berbagai tingkatan atau strata. Provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, sementara kabupaten dan kota dibagi menjadi kelurahan dan/atau desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dimulai perubahan signifikan dalam pengorganisasian dan pengelolaan pemerintahan Desa, terutama dalam aspek-aspek yang terkait dengan pemberian wewenang kepada Desa untuk mengatur pembangunan dan keuangan mereka sendiri secara mandiri sehingga hal ini dijelaskan dalam pasal 4 bagian (h) dan pasal 4 bagian (i) dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa peraturan mengenai Desa bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa serta mengatasi ketimpangan pembangunan nasional; dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai aktor utama dalam Pembangunan (Sartika, 2016).

Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, pendanaan menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran proses tersebut. Hal ini mengarah pada konsep keuangan Desa, yang mencakup semua aspek hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk segala jenis barang dan hal yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Adi et al., 2019). Hak dan kewajiban tersebut berdampak pada beberapa aspek, termasuk pendapatan, pengeluaran, sumber pembiayaan, dan manajemen keuangan Desa. Adapun sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan lainnya seperti pemberian dana hibah (Zainul, 2018). Pendapatan tersebut kemudian dikelola oleh Pemerintahan Desa melalui perencanaan keuangan tahunan yang disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) (Widdy & Wiguna, 2021).

Kampung Semurut Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau kemudian merincikan rencana keuangan tahunan tersebut di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Semurut Tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp.

2.964.659.637,29-. Akan tetapi pada proses pengelolaan anggaran setiap tahunnya selalu saja ada program kerja yang tidak terlaksana di Kampung Semurut yang kemudian menimbulkan masalah yaitu terhambatnya proses pembangunan Kampung.

Tabel 1
Rincian SiLPA Kampung Semurut Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah (dalam rupiah)
1	2019	Rp. 419.535.594,94-
2	2020	Rp. 252.158.637,29-
3	2021	Rp. 241.324.921,29

Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut 2023

Tabel 1 dapat dilihat bahwasanya dalam setiap tahun anggaran berjalan selalu saja ada program kerja yang tidak terlaksana sehingga anggaran yang ada kemudian masuk ke dalam pembiayaan tahun berjalan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini kemudian menimbulkan sebuah permasalahan yaitu tidak terlaksana program kerja pembangunan Kampung yang kemudian akan menghambat proses pemerataan pembangunan yang menjadi tujuan utama dari undang-undangannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fenomena tersebut tentunya diperlukan adanya optimalisasi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Semurut yang berkaitan dengan pembangunan di Kampung Semurut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan di Kampung Semurut dan mencapai cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan prinsip otonomi daerah dalam upaya relevansi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan strategi pendanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Semurut serta faktor pengaruh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018) bahwa penelitian deskripsi dapat dikatakan sebagai penelitian yang berupaya mendeskripsikan objek atau subjek yang diteliti secara objektif, serta menyajikan

fakta secara sistematis, frekuensi yang sesuai, serta dan sesuai karakteristiknya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi literature dari berasal dari jurnal, artikel, dan buku serta sumber informasi yang dipublikasikan melalui internet (Nina Adkk., 2022). Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode penyajian, reduksi dan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL

Kejelasan Tujuan yang ingin dicapai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) merupakan rencana keuangan tahun Pemerintah Kampung yang

dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) melalui Peraturan Kampung. APBK Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung Tahun 2021 yang disusun melalui berbagai tahapan yang dimana salah satunya melibatkan unsur masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kampung Semurut Tahun 2021. Adapun total dana dari APB Kampung Semurut Tahun 2021 ialah sebesar Rp. 2.964.659.637,29- yang dibagi ke dalam 5 (lima) bidang pembelanjaan Kampung.

Tabel 2
Kegiatan Pembangunan Kampung Semurut berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

No	Bidang Pembangunan	Nama Kegiatan
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia	- Peningkatan halaman PAUD - Pengadaan transportasi anak sekolah - Penyelenggaraan Posyandu - Pengadaan tandon air - Pengadaan cuci tangan - Pengadaan Kampung siaga kesehatan
2	Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar	- Pemberian bantuan langsung tunai - Pemberian santunan janda/duda dan fakir miskin
3	Pembangunan sarana dan prasarana Desa	- Peningkatan jalan dermaga - Peningkatan jalan usaha tani - Pembuatan tambatan perahu - Semenisasi halaman gedung serbaguna - Rehabilitasi jembatan titian
4	Pengembangan potensi ekonomi lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.	- Pemberian alat panen padi - Bantuan bibit dan pakan perikanan

Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

Tabel 2 dapat terlihat bahwa Pemerintah Kampung Semurut telah menyusun program kerja yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan Desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut tahun 2021 Pemerintah Kampung Semurut telah memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dasar aturan yang kuat.

Kejelasan Strategi pencapaian tujuan

Cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kampung dalam upaya mencapai tujuan dari penyusunan APB Kampung terdiri dari 5 (lima) yaitu: (1) Penyelenggaraan Pemerintah Kampung; (2) Pelaksanaan Pembangunan Kampung; (3) Pembinaan Kemasyarakatan; (4)

Pemberdayaan Masyarakat; dan (5) Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kampung. Hasil wawancara dapat terlihat bahwa strategi Pemerintah Kampung dalam mencapai tujuan pembangunan Kampung adalah melibatkan masyarakat di dalam proses penyusunan APB Kampung, yang dimana pada pembangunan Kampung berfokus pada 2 (dua) sektor yaitu pada sektor pertanian dan sektor perikanan. Menurut Ramadhani et al., (2022) Strategi adalah proses penentuan tujuan dan petunjuk tindakan, bersama dengan penentuan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tabel 3 dapat terlihat bahwa strategi Pemerintah Kampung Semurut yang telah ditetapkan di dalam RKP Kampung pada dua bidang potensi Kampung, yaitu pada bidang perikanan dan pertanian telah berjalan, dengan menasar pada masyarakat Kampung Semurut

yang mayoritas bekerja sebagai petani dan juga nelayan dengan jumlah anggaran yang besar

dengan tujuan untuk memaksimal potensi sumber daya alam tersebut

Tabel 3
Program Kerja Pemerintah Kampung Semurut dalam Pemanfaatan Potensi Kampung tahun 2021

Bidang dan Kegiatan	Alokasi Dana
Kelautan dan Perikanan	
- Peningkatan jalan dermaga	Rp. 510.100.004,00;-
- Pembangunan tambatan perahu	Rp. 36.500.000,00;-
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/DII)	Rp. 115.500.000,00;-
Pertanian	
- Bantuan Pupuk	Rp. 89.000.000,00;-

Sumber: RKP-Kampung Semurut tahun 2021 (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

Perencanaan yang matang

Sebagai lembaga pelaksana Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung Semurut memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Proses pengelolaan itu sendiri berkaitan erat dengan proses perencanaan. Proses perencanaan dari penyusunan APB Kampung itu sendiri dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung yang mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Kampung disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Kampung yang dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). RKP Kampung kemudian ditetapkan melalui peraturan Kampung paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Kampung inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan dari APB Kampung. Penyusunan APB Kampung ini sendiri ditetapkan berdasarkan kebutuhan prioritas Kampung yang dirumuskan bersama masyarakat melalui Musrenbang Kampung yang kemudian ditetapkan menjadi APB Kampung melalui Peraturan Kampung.

Hasil wawancara tersebut keadaan yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang diungkapkan yang dimana proses penyusunan APB Kampung disesuaikan dengan RPJMK, Peraturan Bupati tahun terkait, serta usulan-usulan masyarakat dalam Musrenbang Kampung yang ditetapkan di dalam RKP Kampung. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang termasuk di dalam Pembelanjaan Kampung yang tidak terlaksana sehingga akhirnya anggaran yang tersisa

menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berikutnya. Adapun program kegiatan yang tidak terlaksana itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) kegiatan di dalam bidang Pembangunan Kampung yaitu, pembangunan gorong-gorong, pembangunan pendopo Rt. 05, serta penambahan teras masjid Al-Akbar Rt.01.

Bahwasanya proses perencanaan di dalam proses penyusunan APB Kampung belum sepenuhnya direncanakan secara matang dikarenakan proses pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana sehingga terdapat sisa anggaran yang ada yang pada akhirnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berikutnya. Program kegiatan yang tidak terlaksana ini terjadi dikarenakan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung belum dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia sehingga kemudian program kegiatan itu tidak terlaksana baik sebagian maupun sepenuhnya. Anggaran belanja Kampung Semurut terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung. Anggaran pembiayaan Kampung yang terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya. Tabel 4 dapat terlihat bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut tahun 2021 mencapai angka 92% sehingga indikator perencanaan yang matang termasuk ke dalam kategori efektif.

Tabel 4
Realisasi Belanja Kampung

Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	958.000.937,29	930.333.592,00	97,1%
Pelaksanaan Pembangunan Kampung	1.058.831.000,00	914.871.000,00	86,4%
Pembinaan Kemasyarakatan	433.701.400,00	380.341.000,00	87,7%
Pemberdayaan Masyarakat	324.526.300,00	315.376.300,00	97,2%
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung	189.600.000,00	187.600.000,00	98,9%
TOTAL	2.964.659.637,29	2.728.521.892,00	92,0 %
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		241.324.921,29	

Sumber : Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

Penyusunan Program yang Tepat Sasaran

Sebagai upaya dalam memaksimalkan potensi yang ada Pemerintah Kampung Semurut kemudian menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut Tahun 2021 dengan mempertimbangkan potensi Kampung, kebutuhan masyarakat, dan juga Visi Misi pembangunan daerah. Hasil wawancara dapat bahwa Pemerintah Kampung telah mengupayakan dalam proses penyusunan program kerja di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan program kerja

yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan juga dengan mempertimbangkan pendanaan, potensi Kampung dan juga visi misi pembangunan dari Pemerintah Daerah berkaitan. Pemerintah Kampung telah mengupayakan upaya pemaksimalan hasil perikanan dengan mengadakan bantuan terhadap masyarakat nelayan baik yang berupa kebutuhan berlayar seperti pengadaan mesin kapal maupun akses infrastruktur masyarakat nelayan seperti jembatan titian, tambatan perahu, dan perbaikan jalan menuju dermaga Kampung Semurut.

Tabel 5
Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut tahun 2021

No	Bidang	Kegiatan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
		- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung
		- Penyusunan/Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kampung
		- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung	- Penyelenggaraan PAUD Milik Kampung (Honor, Pakaian dll)
		- Peningkatan Sarana/Prasarana PAUD/
		- Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku, Honor Taman Baca)
		- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
		- Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
		- Pemeliharaan gedung serbaguna
		- Peningkatan jalan lingkungan pemukiman
		- Peningkatan jalan usaha tani
3	Pembinaan Kemasyarakatan	- Pengadaan sarana dan prasarana transportasi Kampung
		- Peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif kampung
		- Penyelenggaraan pos keamanan Kampung
		- Penyediaan santunan fakir miskin
		- Pembangunan sarana prasarana keagamaan milik Kampung
		- Tunjangan imam masjid/gereja, penghulu, da'i
4	Pemberdayaan Masyarakat	- Pembinaan karangtaruna tingkat kampung
		- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		- Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
		- Peningkatan jalan dermaga
		- Pembangunan tambatan perahu
		- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/DII)
- Pemberian bantuan pupuk NPK dan urea		
		- Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Kampung

Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

Persediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung di dalam proses pengelolaan APB Kampung, dengan adanya sarana serta prasarana yang memadai yang kemudian dapat menunjang pembangunan Kampung menuju ke arah yang lebih baik. Sarana dan prasarana juga menjadi unsur utama di dalam proses penyelenggaraan pemerintah Kampung yang dimana mencakup penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan, dan juga penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Kampung. Kampung Semurut dalam hal sarana dan prasarana termasuk Kampung cukup tertinggal dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di wilayah Kampung.

Tabel 6 dapat terlihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Kampung Semurut masih sangat terbatas terutama berkaitan dengan prasarana Kampung seperti jalan umum yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak ada, sistem keamanan Kampung yang belum berjalan, gedung serbaguna Kampung yang belum ada, dan beberapa fasilitas umum Kampung lainnya yang sekiranya memiliki peran vital di dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut. Adapun pada APBK tahun 2021 ini sendiri sarana dan prasarana mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Kampung sehingga menjadi harapan bagi masyarakat terkait pembangunan Kampung ke arah yang lebih baik.

Bahwasanya sarana dan prasarana di Kampung Semurut belum bersifat memadai, akan tetapi pembangunan sarana dan prasarana mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah Kampung yang dimana pembangunan sarana dan prasarana itu sendiri mencakup pembangunan jembatan titian, peningkatan jalan usaha tani, semenisasi halaman gedung serbaguna, pembuatan tanggul air asin, peningkatan jalan dermaga Kampung, pembuatan tambatan perahu, dan program pembangunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas utama di dalam proses pengelolaan APBK tahun 2021. Tabel 7 dapat terlihat dari 10 (sepuluh) pembangunan infrastruktur Kampung 7 (tujuh) telah terlaksana 2 (dua) tidak terlaksana dan 1 (satu) program kerja terlaksana sebagian. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kampung Semurut memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan sarana dan prasarana di Kampung Semurut.

Tabel 6
Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Kampung Semurut

No	Nama Aset	Jumlah
1	Masjid	2 unit
2	Posyandu	2 unit
3	Pustu	2 unit
4	Lapangan Futsal	2 unit
5	Sekolah Dasar	2 unit
6	PAUD	2 unit
7	Tambatan perahu	4 unit
8	Kantor Kampung	1 unit
9	Rumah sehat	10 unit
10	Irigasi persawahan	1 unit
11	Bendungan	1 unit
12	Gereja	1 unit
13	Pabrik es	1 unit
14	Balai pertemuan Kampung	2 unit
15	Pabrik Penggilingan Padi	-
16	Mobil operasional Kampung	1 unit
17	Motor operasional Kampung	4 unit
18	Mesin traktor bajak sawah	-
19	Mesin panen padi	-
20	Mesin perontok padi	-
21	PDAM	UPTD
22	Mushollah	1

Sumber : RPJM Kampung Semurut Tahun 2020-2025 (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

Tabel 7
Daftar Pembangunan Infrastruktur Kampung Semurut Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Status Pelaksanaan
1	Peningkatan halaman PAUD	Terlaksana
2	Pengadaan transportasi laut anak sekolah	Terlaksana
3	Pembuatan tanggul air asin	Terlaksana
4	Peningkatan jalan dermaga	Terlaksana
5	Rehabilitasi jembatan titian	Terlaksana
6	Semenisasi gedung serbaguna	Terlaksana
7	Pembuatan tambatan perahu	Terlaksana

8	Pembangunan gorong-gorong	Tidak terlaksana
9	Pembangunan pendopo	Tidak terlaksana
10	Penambahan teras masjid Al-Akbar	Terlaksana sebagian

Sumber: Arsip Kantor Kepala Kampung Semurut (Dokumentasi, 06 Januari 2023)

Faktor Pengaruh Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Faktor pendukung

Berbicara tentang lembaga pelaksana Pemerintahan Kampung sumber daya manusia merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung Semurut, dengan jumlah penduduk mencapai 1202 jiwa Kampung Semurut termasuk ke dalam pola menengah di dalam kategori susunan organisasi Pemerintah Kampung yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Peraturan Bupati ini kemudian yang menjadi landasan di dalam tes masuk perangkat Kampung yang dimana terdiri atas tes tertulis, wawancara, dan juga uji kompetensi sehingga menjadikan aparatur Kampung Semurut terjamin kemampuannya di dalam menjalankan roda pemerintahan Kampung. Hal ini juga didukung dengan sarana dan prasarana Kantor Kepala Kampung yang memadai sehingga aparatur Kampung dapat menjalankan operasional Kantor dengan baik.

Masyarakat usia produktif juga menjadi salah satu faktor pendukung Kampung Semurut di dalam proses pengelolaan APB Kampung, dengan jumlah penduduk mencapai 1202 jiwa, 759 jiwa diantaranya termasuk di dalam usia produktif atau dengan persentase mencapai 63,1%. Hal ini kemudian menjadikan Kampung Semurut tidak pernah kekurangan sumber daya manusia terutama di dalam pelaksanaan program kerja pembangunan di Kampung Semurut, yang dimana di dalam prosesnya banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu berkaitan dengan penduduk Kampung Semurut, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu kekuatan utama di dalam proses pelaksanaan pembangunan Kampung. Hasil wawancara diketahui bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu kekuatan Kampung Semurut di dalam proses pengelolaan APBK.

Faktor penghambat

Pada proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut pada tahun 2021 itu sendiri Pemerintah Kampung Semurut memiliki beberapa kelemahan yang kemudian berakibat tidak terlaksana beberapa

program kerja yang telah dianggarkan. Salah satu faktor tersebut adalah topografi Kampung yang terbilang cukup sulit untuk dijangkau terutama di wilayah Rt. 3,4 dan juga 5 yang terdapat di muara sungai Semurut sehingga satu-satunya akses untuk menuju ke wilayah tersebut adalah melalui transportasi air. Hal ini juga kemudian menimbulkan permasalahan lain terkait dengan suplai barang yang susah untuk dijangkau sehingga program kerja yang direncanakan mengalami kesulitan untuk terlaksana. Faktor lainnya di Kampung Semurut adalah infrastruktur Kampung yang belum memadai terutama berkaitan kembali dengan topografi Kampung yang terpisah sehingga infrastruktur yang dibangun di daratan utama Kampung belum mampu menjangkau keseluruhan wilayah di Kampung Semurut. Salah satunya adalah tidak tersedianya jaringan komunikasi seluler di beberapa wilayah di Kampung Semurut sehingga menghambatnya komunikasi yang berusaha untuk dijalin antara Pemerintah Kampung dengan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi seluler.

Selain itu faktor penghambat di dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kampung Semurut adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh aparatur Kampung seringkali tidak dilakukan secara matang sehingga mengakibatkan beberapa program kerja itu tidak terlaksana. Hasil wawancara diketahui bahwa proses perencanaan yang tidak matang menjadi salah satu faktor penghambat di dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semurut yang berdampak pada program kerja yang tidak dijalankan dengan baik atau tidak terlaksana sama sekali.

SIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Semurut Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau Tahun 2021 berada dalam kategori efektif dengan indikator berupa, 1) Kejelasan tujuan yang dicapai, 2) Kejelasan strategi mencapai tujuan, 3) Perencanaan yang matang, 4) Penyusunan program yang tepat sasaran, 5) Ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor yang mendukung

efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kampung Semurut berupa, SDM aparatur yang memadai, partisipasi penduduk usia produktif tinggi, komunikasi baik antar pemerintah kampung. Sedangkan, faktor yang menghambat berupa adanya topografi kampung yang sulit terjangkau, akses suplai barang yang terbatas, sarana dan prasarana kampung belum memadai, serta perencanaan program kerja tidak matang. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan rekomendasi berupa, memaksimalkan Badan Usaha Milik Kampung untuk mendorong perekonomian dan pembangunan kampung, Kemudian, meningkatkan skill masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan fasilitas fisik, serta memperbesar dermaga dan menyalurkan kebutuhan air secara massal dalam rangka memudahkan akses transportasi dan pengadaan suplai barang. Terakhir, diperlukan pertimbangan faktor penghambat seperti cuaca, waktu, topografi, dan ketersediaan bahan dalam membangun Kampung Semurut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. S. K., Dian, P. P., Made, I. P. N., & Gusti, B. N. P. P. 2019. Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Alfinia, M. 2021. Histori Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *OSF*, 1(1), 1–44.
- Ali, S. K. 2018. Mengelola Hubungan Pemerintahan Pusat Dengan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi. *Ilmu Dan Budaya*, 2(1), 1–16.
- Sartika, P. L. 2016. Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Kementrian Hukum Dan HAM Riau*, 3(1), 1–15.
- Fartini, A. 2022. Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11.
- Halwati, U. 2021. *Relasi antar umat beragama di media*. STAIN Press.
- Nina A, Hanifa D, Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia, M. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Ramadhani, S., Nasution, H., Azhari, I., & Kustiawan, W. 2022. Strategi Lobi dan Negosiasi Dalam Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(1), 1–7.
- Widdy, Y. W., & Wiguna. 2021. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2).
- Zainul, A. M. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komerin Ilir, Sumatra Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 2–22.
- Zellatifanny, C., & Mudjiyanto, B. 2018. Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.